
Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Rangka Menyongsong Pasar Global

oleh:

***) Rosmiati, S.Pd., M.Pd.**
****Dosen Universitas Jambi**

Abstract

The era globalization has challenged business to compete produce a quality product types. Once the importance of the role of bussines especially micro, small and medium enterprises (SMEs) in producing a product, it is necessary effors and right strategies for empowering micro, small and medium enterprises (SMEs). This study aims to develop a proper strategi to maximize and develop micro, small and medium enterprises (SMEs) and area need to be known and analyzed. The method in this study is a deskriptif study of literature review study discussed the strategi of empowering micro, small and medium enterprises (SMEs). The are three (3) basic policies needed in empowering micro, small and medium enterprises (SMEs), which are (1) creating a conducive bussinessenvironment at the same time providing an evirontment that encourages the development of SMEs syystemically, independent, and sustainable, (2) creating insurance system financially to the operation of productive economic activities undertaken by SMEs and (3) provide technical assistance and managerial assistance in order to improve th e status of SME. The conclusion of this literature review provide an important means for achieving planning appropriate strategies on micro, small and medium enterprises (SMEs).

Keywords: *Strategi, Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).*

PENDAHULUAN

Abad ke-21 sering disebut sebagai era ekonomi kreatif, hal ini terlihat dari keberadaan ilmu pengetahuan dan ide sebagai motor dalam perkembangan ekonominya. Perkembangan dari ekonomi industry ke ekonomi kreatif ini disikapi oleh pemerintah diberbagai Negara berkembang untuk memngembangkan masyarakatnya yang berbasis kreativitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable dibandingkan ekonomi industry yang sudah sangat bergantung pada resource. Dalam industry kreatif diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi, yang menggambarkan kepribadian/watak seorang wirausaha, dan untuk membangun semangat kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu program pendiodikan yang pada intinya adalah pengembangan metodologi pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha. Globalisasi telah menuntut kita

mengubah tatanan kehidupan dalam masyarakat, dan ini merupakan tantangan dalam pendidikan untuk menyiapkan dan membenahi sumber daya manusia yang kita miliki agar mampu bersaing dipasar global.

Pada akhir dasa warsa ini daerah telah tumbuh dengan sangat cepat dengan ditandai tiga hal, pertama jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar dan semakin meningkat, kedua proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sector industry di kota hamper tidak dapat bertambah dan malahan mungkin berkurang, ketiga jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat, sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan dan transportasi yang memadai, ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Study yang dilakukan Todaro (2000) dikatakan bahwa sector informal pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatannya produksi barang dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya dimiliki perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya) dan teknologi yang dipakai relative sederhana. Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya disektor UMKM. Biasanya tidak memiliki pendidikan formal, pada umumnya mereka tidak mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja, oleh sebab itu produktivitasnya dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah dari pada kegiatan-kegiatan bisnis lainnya, selain itu mereka yang ada di sector tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan mereka di tempat lain.

Kawasan perkotaan di Indonesia seperti juga perkotaan di dunia ketiga banyak dijumpai berkembangnya industry kecil sebagai akibat tidak mampunya pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Beberapa kegiatan industry kecil bahkan masuk dalam sector informal, namun keberadaan mereka belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada umumnya pemerintah daerah sebagai pengelola kota masih banyak memikirkan sector formal yang lebih mudah dikontrol, pada sector industry kecil dan menengah memiliki kontribusi yang nyata bagi pengentasan masalah pengangguran dan masalah perekonomian kawasan perkotaan. ILO melaporkan bahwa 60% buruh di kota-kota Negara berkembang diserap oleh sector informal dan kegiatan pada usaha kecil dan menengah (UMKM). Dilaporkan juga bahwa peran sector UKM sangat penting karena mampu menciptakan pasar – pasar, mengembangkan perdagangan, mengelola sumber alam, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, membangun masyarakat, dan menghidupi

keluarga mereka tanpa control dan fasilitas dari pihak masyarakat yang memadai (ILO, 1991 dan Redyy et al, 2002). Di Indonesia sector UKM bahkan menjadi tumpuan kehidupan yang semakin besar sejak terjadinya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 (Sarosa, 2000).

Indonesia merupakan negara yang selama ini oleh para ekonomi dunia selalu dipuji karena bisa survive dan tahan dari terpaan krisis ekonomi global. Utamanya krisis yang terjadi akibat subprime mortgage di AS pada tahun 2008 silam. Transmisi krisis global menyebabkan pasar finansial bergejolak akibat ketidakpastian, akhirnya terjadi kemacetan aliran modal yang mengganggu perdagangan dan secara sistemik berefek pada pertumbuhan ekonomi. Secara normatif di dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, program utama pemerintah adalah bertujuan mendorong daulat perekonomian nasional dengan menysasar sektor rill seperti pertanian, industri, pertambangan, energy, kawasan strategis, kelautan, dan pariwisata. Namun konsep ini belum diimplementasikan sepenuhnya.

Usaha kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan terhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen SDM, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan SDM mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Dalam pembahasan mengenai sector usaha kecil tentunya tidak terlepas dengan permasalahan urbanisasi dan migrasi ataupun pengangguran. Kenyataan baru tersebut adalah terjadinya arus urbanisasi dan migrasi yang melanda dunia secara besar-besaran. Adanya perpindahan atau mobilisasi dari pedesaan ke perkotaan tersebut secara berkait mau tidak mau adalah karena akibat strategi pembangunan yang dijalankan, terlepas dari terdapatnya implikasi baik positive maupun negative yang ditimbulkan ternyata keberadaan urbanisasi dan migrasi menjadikan satu kasus tersendiri yang mutlak memerlukan pengelolaan dan perencanaan dari sisi kebijakan ekonomi (economic policy).

Permasalahan urbanisasi dan migrasi dianggap sebagai kekuatan yang terus- menerus memperburuk masalah pengangguran diperkotaan yang disebabkan ketidakseimbangan structural dan ekonomi antar daerah pedesaan dan perkotaan, dimana lokasi perkotaan diberi insentif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Sementara lokasi pedesaan justru makin lama makin dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan untuk mengakselerasi tingkat kemajuannya. Dengan begitu terjadinya urbanisasi dan migrasi pada hakikatnya merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas pembnagunan antara satu daerah dengan daerah lain, dan untuk itu terdapat argumentasi bahwa model pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini tidak mengarahkan adanya suatu hasil atau pemerataan sejajar antar wilayah didaerah yang sama dalam hal ini antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Perkembangan sector usaha kecil dan menengah hingga saat ini jumlahnya telah menggelembung sedemikian besar bahkan hamper menyamai jumlah mereka yang bekerja di sector formal lainnya. Dibanyak Negara miskin dan berkembang kontribusi yang bias diberikan pelaku usaha kecil mencapai 30 % - 60 % dari seluruh penduduk perkotaan. Menurut Tambunan (2000) , disebutkan bahwa di Indonesia diihat dari jumlah unit usaha yang sangat banyak yang terdapat disemua sector ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, khususnya di daerah pedesaan dan bagi keluarga berpendapatan rendah tidak dapat diingkari betapa pentingnya UKM bagi pembangunan ekonomi nasional. Selain itu selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas local.

Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

ekonomi. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN.

Menurut Usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN.

DEFENISI USAHA KECIL MENENGAH

a. Usaha kecil

Badan Pusat Statistik mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang memiliki tenaga kerja lebih dari empat orang, sedangkan usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang beskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200.000 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan paling banyak 1 milyar rupiah/tahun serta dapat menerima kredit dari Bank maksimal di atas 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Words Bank mendefinisikan Small enterpress dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta, jumlah asset tidak melebihi \$ 3 juta.

Namun demikian pengertian terbaru mengenai usaha kecil menurut Undang-undang No 20 tahun 2008 adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang –perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp.500.000.00(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah. Sampai dengan Rp. 2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Usaha Menengah

Pengertian Usaha Menengah menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang hingga 99 orang. Sedangkan usaha menengah sebagaimana menurut Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) s/d paling banyak Rp. 10.000.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari Bank sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Sedangkan pengertian Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah) s/d rp.10.000.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

METODE PENELITIAN

Analisis ini memberikan gambaran pola-pola konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari ditafsirkan secara singkat dan mendalam berdasarkan hasil analisis deskriptif (kuncoro, 2003). Dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut. Disamping itu juga dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekomendasi srstrategi pengembangan UKM dalam berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, berikut beberapa pilihan strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan UKM, yaitu:

1. Kemudahan dalam Akses permodalan

Salah satu permasalahan yang dihadapi UKM adalah upaya permodalan , lambannya akumulasi capital di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah,

merupakan salah satu penyebabnya lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sector usaha mikro, kecil dan menengah. Factor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru diluar sector ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UKM melalui aspek permodalan ini adalah:

1. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan
2. Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan system yang kondusif baru bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan
3. Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersma. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik untuk bertanggung-jawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka bertanggung-jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbias bekerja sama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. *Bantuan Pembangunan Prasarana*

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya sarana prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka

pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. *Pengembangan Skala Usaha*

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi capital akan sulit dicapai dilangan orang miskin. Oleh sebab itu akumulasi harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama . demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok , mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. *Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha*

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangann kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternative bagi eksistensi UKM di Indonesia. Meskipun banyak usaha kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga eksistensinyapun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pembangunan jaringan melalui pendekatan kluster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam kluster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global.

5. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia merupakan factor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sector usaha kecil. Keberhasilan industry skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestic ditentukan oleh

kemampuan pelaku-pelaku dalam industry kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia adalah karena kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relative masih tradisional.

6. *Peningkatan Akses Teknologi*

Penguasaan teknologi merupakan salah satu factor penting bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah. Di Negara-negara maju keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan usaha kecil menengah adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengembangan pusat dan dwifungsi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi usaha kecil dan menengah dan peningkatan kerjasama antara asosiasi – asosiasi UKM dengan perguruan tinggi atau pusat-pusat penelitian pengembangan teknologi UKM.

7. *Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif*

Perkembangan usaha kecil menengah akan sangat ditentukan dengan ada atau tidaknya iklim bisnis yang menunjang perkembangan usaha kecil menengah. Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha seperti terlihat dengan masih rendahnya pelayanan public, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif.

KESIMPULAN

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian local daerah, khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja , namun demikian industry UKM masih menghadapi berbagai masalah mendasar,yaitu masalah kualitas produk, pemasaran. Diperlukan berbagai kebijakan yang bersifat terobosan untuk memotong mata rantai masalah yang dihadapi UKM, khususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam bidang pengembangan produk dan pemasaran . adapun regulasi dari pemerintah yang

diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya UKM meliputi perbaikan sarana dan prasarana , akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka serta untuk meningkatkan pangsa pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- ILO, (1991), *The Dilemma of the informal sector*, Report of the Director General
- Kementrian Koperasi dan UKM, (2010), *Renstra (Rencana Strategis) Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2010-2014*
- Kuncoro, Mudrajat, (2004), *Ekonomi dan Pembangunan Daerah:Reformasi, Perencanaan, strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro,Phd.M.2007. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga,Jakarta
- Moelong.2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Rudjito,2003.Peran lembaga keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan menanggulangi kemiskinan. *Jurnal ekonomi rakyat* Th.II No.1-Maret 2003,www .Ekonomi Rakyat. Tanggal 4 januari 2009.
- Suharjono,2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* Jakarta: UPP AMP YKPN ikut mencerdaskan Bangsa.
- Soetrisno,N.2004. *Proses Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, Makalah dipresentasikan pada makalah perkoperasian.*
- Tambunan, Tulus (2002) “Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan Prospeknya “
Usahawan –N0-07,Th XXXI-Juli, Hal 3-15.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah